

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

JAMALUDDIN ISKANDAR

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Makassar
Email: jamaluddiniskandar@yahoo.co.id

Abstrak:

This paper aims to announce the implementation of finance education management. The implementation of school education financial management is usually carried out and implemented the functions of education financial management, especially the management of BOS funds, but is still constrained by peruses before the receipt of BOS funds and the slow disbursement of funds from determinants of policies that influence subsequent program. In accordance with this fact, the authors suggest that it is better to implement school financial management, especially in the management of BOS funds, to improve management systems in administrative management, especially in the collection of pedagogic data for completing the conditions for receiving BOS funds for schools so that plans can be implemented and the skills of the principal to find other funding sources to overcome the limited funds.

Keywords: Intellectual Ability, Motivation, Master Performance

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh perekonomian suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, melainkan juga akan berpengaruh terhadap dinamika masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat (Nanang, 2012).

Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada pasal yang lain disebutkan secara lebih jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/ atau keluarga peserta didik.

Pengalokasian dana di dunia pendidikan tidak lain ialah suatu penanaman modal pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak mungkin mempunyai keterampilan tinggi tanpa sentuhan pendidikan. Sentuhan

pendidikan yang dapat menciptakan keterampilan tinggi tidak mungkin dijalankan apa adanya, dengan pendanaan yang terlalu rendah.

Masalah perluasan kesempatan (akses) merupakan dampak nyata dalam memberikan tempat pada demokratis pendidikan (pendidikan untuk semua) sebagai pendidikan nasional kita selalu dihadapkan pada masalah kualitas dan kuantitas. Masalah kualitas terdesak oleh pemikiran kuantitas, terlebih pada masa krisis ekonomi dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah, meningkatnya putus sekolah. Melemahnya kemampuan menyekolahkan sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat kita pahami karena struktur pengeluaran sebagian besar adalah untuk kehidupan primer. (Nanang, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tanggal 25 Juli 2013. Salah satu tujuan PMU adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Sementara itu pada Tahun 2013 juga telah diluncurkan implementasi Kurikulum 2013. Untuk mencapai tujuan PMU yang terjangkau dan bermutu serta menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013, pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA). Pada Tahun 2014, telah disiapkan anggaran sebesar 4,3 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Tujuan program BOS SMA ini adalah membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional non-personalia termasuk didalamnya membantu pengadaan buku pelajaran Kurikulum 2013. (Direktorat Pembinaan SMA)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis dapat mengemukakan pokok-pokok permasalahan yaitu: Bagaimana implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan?

KAJIAN TEORI

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut.

Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan

Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut W. Gerald Cole dalam bukunya *Accounting System* yang dikutip oleh Drs. Zaki Baridwan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi.

Jadi, berdasarkan pada pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Pengertian Manajemen Keuangan

Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata yaitu “manajemen” dan “keuangan”. Kata manajemen (*management*) mempunyai beberapa arti, tergantung pada konteksnya.

Menurut (Arianti, 2003) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pengertian keuangan menurut Lawrence J. Gitman (2003) dalam bukunya *Principles of Managerial Finance* menyatakan bahwa *finance can be defined as the art and science of managing money*. Keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan uang.

Keuangan merupakan ilmu dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dalam sebuah organisasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh organisasi.

Manajemen keuangan menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu:

1. Menurut Maysarah manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. (Maysara)
2. Menurut Husnan Suad manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi-fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu (Husnan)

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah proses pengaturan terhadap fungsi-fungsi keuangan oleh ketatausahaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban keuangan.

Pengertian Pendidikan

Sedangkan menurut M.J. Langeveld, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain, dengan kata lain

membimbing anak mencapai kedewasaan.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah pemberian pengalaman yang diberikan kepada seorang anak agar anak menjadi dewasa. Namun yang ingin di bahas dalam pengertian ini adalah pendidikan sebagai objek atau tempat berlangsungnya pendidikan itu sendiri yaitu lingkungan sekolah.

Berdasarkan pada beberapa pengertian sistem, manajemen keuangan, dan pendidikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem manajemen keuangan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan dengan mengembangkan dan mengelola sumber keuangan dan potensi-potensi yang dimiliki dalam sistem pendidikan tersebut secara efektif dan efisien di lingkungan sekolah. Manajemen keuangan termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memerlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap dana tersebut.

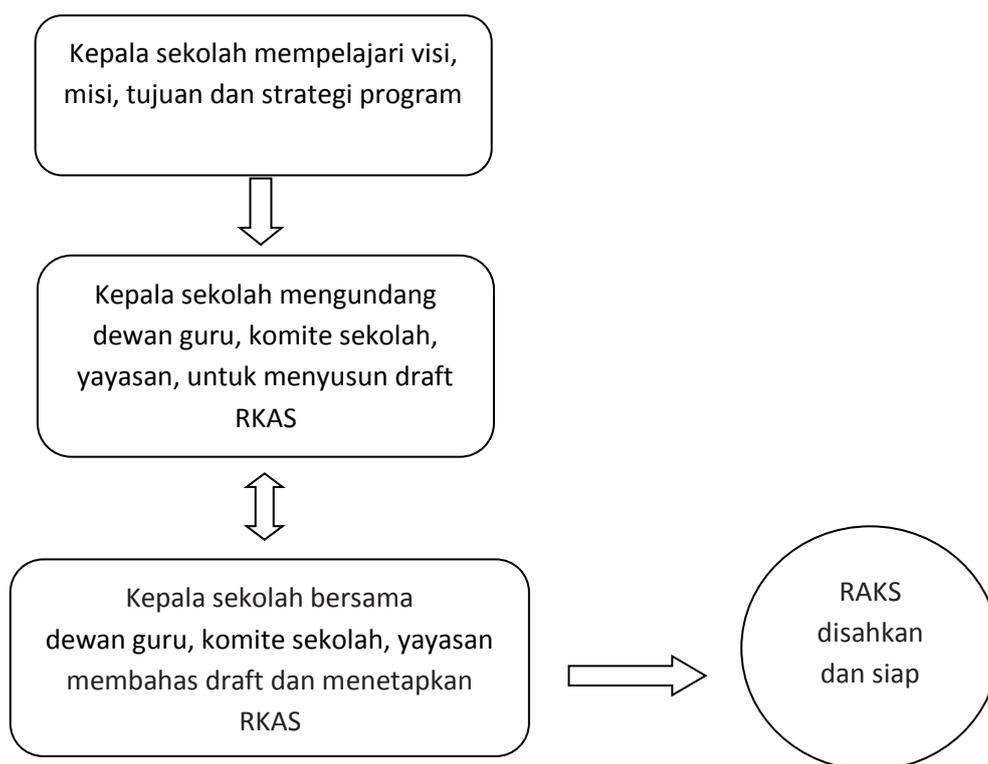
PEMBAHASAN MASALAH

Perencanaan Keuangan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan akan dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Perencanaan keuangan sekolah adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dengan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk proposal untuk setiap komponen kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. Sistem Perencanaan Sekolah.

Proses perencanaan yang dilakukan dimulai dengan rapat bersama yang diadakan oleh kepala sekolah dengan mengundang dewan guru, komite sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta dari pihak yayasan yaitu pimpinan cabang muhammadiyah ujung tanah yang dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Hasil dari rapat tersebut akan dibentuk proposal kebutuhan atau lebih dikenal dengan RKAS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) yang berisi rencana anggaran biaya untuk kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan.

Kepala sekolah dan bendahara sekolah menyusun anggaran berdasarkan hasil rapat. Dalam penyusunan keuangan tidak lepas dari kendala yang ada, adapun kendala yang dihadapi yaitu kebutuhan yang semakin banyak namun dana yang tersedia terbatas. Sehingga untuk menghadapi kendala tersebut kepala sekolah menggunakan skala prioritas. Kebutuhan yang sangat mendesak maka kebutuhan tersebut yang didahulukan.



Gambar 1.
Sistem Perencanaan Keuangan Sekolah

Pelaksanaan Keuangan

Pelaksanaan keuangan adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan pengeluaran.

Proses pelaksanaan keuangan pada segi penerimaan, sumber keuangan sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pendidikan gratis. Selain dari kedua sumber keuangan tersebut sekolah tidak menerima dari masyarakat.

Prosedur pengelolaan penerimaan keuangan dilakukan langsung oleh bendahara dengan sistem satu pintu. Bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan sekolah juga terbagi dua yaitu buku kas umum dan buku kas harian. Pengalokasian sumber keuangan pula dibagi dua yang terdiri dari 70% untuk kegiatan kesiswaaan dan 30% untuk kegiatan SDM (sumber daya manusia). Karena menggunakan sistem satu pintu, maka penanganan pembukuan keuangan sekolah ditangani oleh bendahara sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah.

Proses pengelolaan pada segi pengeluaran, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan biaya untuk setiap program. Semua biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan program sekolah, dan pada setiap program sekolah ada pihak yang bertanggungjawab. Pihak yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah para

wakil kepala sekolah yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang humas (hubungan masyarakat) serta kepala tata usaha.

Pengendalian pengeluaran sekolah selalu merujuk pada kebutuhan yang tercantum dalam rencana kegiatan anggaran sekolah. Kendala utama pada pelaksanaan keuangan sekolah yaitu keterbatasan dana dan perubahan harga barang yang semakin naik, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut digunakan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Pelaksanaan keuangan sekolah hanya ditangani oleh kepala sekolah dan bendahara yang dipertanggungjawabkan kepada yayasan.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat dilihat pada evaluasi, bentuk pertanggungjawaban dan keterlibatan pengawas eksternal. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan atau per enam bulan, yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Dari hasil evaluasi kemudian dilakukan tindak lanjut untuk meminimalisir kebutuhan yang tidak terlalu penting dan mengefisienkan dana yang dikeluarkan.

Kepala sekolah sangat berperan dalam mengevaluasi setiap kegiatan dengan memberikan pemahaman kepada setiap penanggungjawab kegiatan tentang pengeluaran yang dibiayai, memonitoring, dan membimbing. Selain dari internal, ada juga evaluator eksternal yaitu dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Dengan mengecek bukti fisik pengeluaran yang tercantum pada laporan yang terdapat pada kwitansi-kwitansi atau bukti pembelian barang yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban keuangan sekolah dipertanggungjawabkan kepada kementerian pendidikan nasional dalam bentuk dokumen laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Setelah dilaporkan maka tindak lanjut dari pertanggungjawab tersebut yaitu revisi laporan dengan cara menindaklanjuti kegiatan yang belum terlaksana. Bentuk transparansi dapat dilihat pada evaluasi oleh kepala sekolah dan monitoring oleh pihak yayasan.

Pengelolaan Dana BOS

Perencanaan Dana BOS

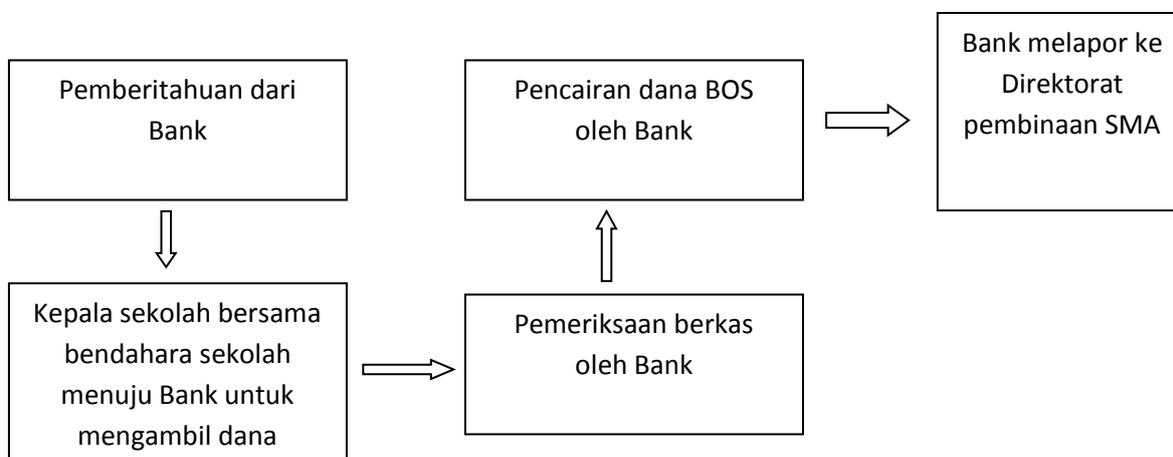
Perencanaan pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan penyusunan usulan dana BOS atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS. RKAS disusun berdasarkan petunjuk teknis (juknis), dan sumber dana dikelompokkan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah termasuk dana BOS dimasukkan dalam RKAS berupa dokumen usulan dana BOS atau RAB BOS. Setiap penyusunan anggaran terutama penyusunan rencana anggaran dana BOS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan dewan guru, bendahara sekolah, wakil kepala sekolah, kepala seko

Untuk mendapatkan dana BOS dibutuhkan data siswa dan data siswa miskin penerima Berdasarkan data di atas maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaan dana BOS dilakukan dengan menyusun RKAS dan RAB BOS dengan melibatkan dewan guru, bendahara sekolah, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, komite sekolah dan yayasan. Pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan tergolong masih perlu diperbaiki khususnya pada kelengkapan administrasi mengenai data siswa yang harus diinput ke aplikasi dapodik.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di sekolah dari beberapa bagian yaitu diawali dari tahap penyaluran Dana BOS sekolah, pengambilan dana, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dengan dana BOS, pembukuan dana BOS, dan perpajakan terkait pengelolaan dana BOS.

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap awal triwulan dan pengambilan dana BOS dilakukan pada akhir bulan oleh kepala sekolah dan bendahara. Akan tetapi pengambilan dana sering terhambat disebabkan lamanya pencairan dana BOS sehingga menyebabkan tidak menentunya pengambilan dana BOS. Penggunaan dana BOS yang diterima digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar dan pengembangan sekolah. Namun, dana BOS yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai pencairan dana BOS dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.
Pencairan Dana Bos

Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa pencairan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah bersama bendahara sekolah dengan melengkapi berkas persyaratan pencairan dana yaitu SK pengangkatan kepala sekolah, SK pengangkatan bendahara sekolah, akte pendirian sekolah atau surat izin

operasional sekolah yang masih berlaku, KTP atau SIM kepala sekolah, KTP atau SIM bendahara sekolah.

Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

Pengawasan dana BOS dilakukan dengan membentuk tim pengawas pengelolaan dana BOS dari yayasan. Selain yayasan, dinas terkait yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan juga ikut mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah.

Komite sekolah dan yayasan selaku pihak pengawas internal melakukan pengawasan atas terlaksananya pengelolaan dana BOS sesuai dengan perencanaan BOS Monitoring yang dilakukan oleh dinas pendidikan yaitu pada saat periode berjalan pengelolaan dana BOS. Pengawasan dilakukan pada aspek perencanaan dan pengeluaran anggaran. Hasil dari pengawasan itu adalah pengawas merevisi dan mengoreksi anggaran kegiatan.

PENUTUP/SIMPULAN

1. Sistem manajemen keuangan pendidikan dapat dilihat dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan di sekolah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pendidikan.
2. Pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan di sekolah adalah (1) perencanaan yang meliputi: penyusunan RKAS dan RAB BOS, (2) pelaksanaan yang meliputi: penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dengan dana BOS, pembukuan dana BOS dan perpajakan terkait pengelolaan dana BOS, (3) Pengawasan dan evaluasi yang meliputi: pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal dan eksternal dan evaluasi oleh kepala sekolah dan komite sekolah serta yayasan, (4) Pelaporan yang meliputi: pelaporan penggunaan dana BOS dan publikasi penggunaan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathoni. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka. 2003.
- Arianti, Dewi. "Penerapan Manajemen Keuangan Pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Cole, W. Gerald. *Accounting system, disadur oleh Dr. Zaki Baridwan dalam bukunya Sistem Akuntansi- Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPF. 1994.
- Depdiknas. *Manajemen keuangan: Materi pelatihan terpadu untuk kepala sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama. 2002.

- Direktorat Tenaga Kependidikan. *Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah*. Departemen Pendidikan Nasional. 2007.
- Direktorat Pembinaan SMA. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (SMA)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014
- Fattah, Nanang. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya. 2012.
- Gitman, Lawrence J. *Principles of Managerial Finance*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. 2003.
- Hastyarini, Ega Resky. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menengah Atas (BOS SMA) di SMA 1 Pejagoan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tahun 2014". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2015.
- Idris, Ridwan. *Manajemen Pendidikan dalam aplikasinya di sekolah*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Irianto, Agus. *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Jusuf, Kadarman. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Kamaruddin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. *Wawancara oleh peneliti, di ruang dewan guru SMA Muhammadiyah 5 Makassar, 16 Juli 2016*.
- Kemdikbud. *Iktisar Data Pendidikan 2011-2012 Buku Ringkasan Data Pendidikan Final Buku Saku*. Jakarta: Kemdikbud, Sekjen Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2012.
- Komariah, Aan dan Engkoswara. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Krina P, Loila Lalolo. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003.
- Kurniawan, Agung. *Tranformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Martono dan Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonosia. 2010.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Mustari, Mohamad. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo. 2014.
- Musfah, Jejen. *Manajemen Pendidikan, Teori, Kebijakan dan Praktik*, Jakarta: Kencana. 2015.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2002.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai*.

- Riyadi, Sugeng. "Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan Manajemen Sekolah (Studi Kasus di MTs Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan)". *Skripsi*. Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 2007.
- Salamah, Ummu. "Studi Mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah di Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: FE UGM. 1994.